

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Analisis Sektor Unggulan Wilayah

Identifikasi sektor unggulan dalam suatu wilayah sangatlah penting, terutama untuk menentukan prioritas utama dan perencanaan pembangunan daerah. Dengan dilakukannya identifikasi sektor unggulan maka dapat diketahui komoditas ekspor suatu wilayah dan komoditas ekspor tersebut merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Aktivitas dalam ekonomi regional di golongkan dalam dua kelompok yaitu kegiatan basis dan kegiatan non basis:

1. Kegiatan basis merupakan kegiatan ekonomi yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan basis memiliki perananan penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, semakin besar jumlah ekspor (barang dan jasa) suatu wilayah maka semakin pesat pula pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.
2. Kegiatan non basis merupakan kegiatan yang hanya menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasaran hanyalah bersifat lokal.

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor perekonomian. Sektor-sektor perekonomian tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor, yaitu: (1) Pertanian, Peternakan Kehutanan dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian,

(3) Industri pengolahan, (4) Listrik, Gas dan Air bersih, (5) Bangunan dan Konstruksi, (6) Perdagangan, Hotel dan Restoran, (7) Pengangkutan dan Komunikasi, (8) Keuangan, Real estat dan Jasa perusahaan, (9) Jasa-jasa.

Dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi sektor unggulan di Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan analisis Location Quotient (LQ). Dengan menggunakan analisis LQ dapat diketahui sektor-sektor apa saja yang merupakan sektor basis dan berpotensi menjadi komoditas ekspor suatu wilayah. Adapun nilai rata-rata sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada tabel Berikut:

**Tabel 5.1. Nilai Rata-Rata LQ Kabupaten/Kota DIY  
Tahun 2008-2012**

<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Yogya</b>	<b>Sleman</b>	<b>Bantul</b>	<b>Gunung Kidul</b>	<b>Kulon progo</b>
Pertanian	0,02	0,88	<b>1,30</b>	<b>2,12</b>	<b>1,48</b>
Pertambangan	0,01	0,72	<b>1,29</b>	<b>2,44</b>	<b>1,27</b>
Industri Pengolahan	0,82	<b>1,17</b>	<b>1,26</b>	0,85	<b>1,16</b>
Listrik Gas dan Air	<b>1,39</b>	0,99	0,96	0,59	0,68
Bangunan	0,83	<b>1,17</b>	<b>1,22</b>	0,86	0,53
Perdagangan, Hotel & Restoran	<b>1,20</b>	<b>1,06</b>	0,94	0,70	0,82
Pengangkutan & Komunikasi	<b>1,92</b>	0,57	0,69	0,68	0,97
Keuangan & Jasa Perusahaan	<b>1,48</b>	<b>1,10</b>	0,66	0,50	0,67
Jasa-Jasa	<b>1,24</b>	<b>1,04</b>	0,80	0,80	<b>1,05</b>

*Sumber : BPS DIY 2013, diolah*

Secara umum masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sektor unggulan lebih lebih dari 3 sektor terkecuali kabupaten Gunung Kidul yang hanya memiliki 2 sektor unggulan yaitu pertanian dan Pertambangan. Semakin banyak sektor unggulan mengindikasikan bahwa suatu wilayah

memiliki tingkat perkembangan wilayah yang baik. Hasil perhitungan LQ berdasarkan aktivitas sektor perekonomian masing-masing kabupaten/kota selama periode lima tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor-sektor perekonomian yang unggul di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nilai LQ > 1 antara lain sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, jasa-jasa (3 kabupaten/kota), sektor bangunan, perdagangan hotel dan restoran, sektor keuangan dan jasa-jasa (2 kabupaten/kota) dan sektor listrik gas dan air, serta sektor pengangkutan dan komunikasi (1 kabupaten/kota)

**Tabel 5.2 Sektor-Sektor Unggulan Tiap Kabupaten/Kota di DIY  
Tahun 2008-2012**

SEKTOR UNGGULAN	KAB/KOTA	SEKTOR UNGGULAN	KAB/KOTA
Pertanian	Bantul	Bangunan	Sleman
	GunungKidul		Bantul
	Kulonprogo	Perdagangan, Hotel & Restoran	Sleman
Pertambangan & Galian	Bantul	Pengangkutan	Yogyakarta
	GunungKidul		Yogyakarta
	Kulonprogo		Yogyakarta
Industri Pengolahan	Sleman	Keuangan, Jasa Perusahaan	Sleman
	Bantul		Yogyakarta
	Kulonprogo		Sleman
Listrik, Gas & air	Yogyakarta	Jasa-Jasa	Kulonprogo

*Sumber: BPS DIY 2013, Diolah*

Secara rinci sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan masing-masing kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

### 1. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta memiliki 5 (lima) sektor unggulan yang berpotensi untuk dikembangkan. Sektor unggulan tersebut adalah sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa lainnya. Kelima sektor tersebut merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB kota Yogyakarta dibandingkan dengan sektor lainnya.

### 2. Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman memiliki 5 (lima) sektor unggulan, karena terdapat lima sektor yang memiliki nilai  $LQ > 1$ . Sektor-sektor tersebut adalah sektor industri pengolahan, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan serta sektor jasa-jasa. Artinya kelima sektor tersebut memiliki sumbangan lebih besar terhadap PDRB kabupaten Sleman dibandingkan dengan sumbangan sektor yang sama terhadap PDRB Provinsi.

### 3. Kabupaten Bantul

Sektor unggulan yang dimiliki oleh kabupaten Bantul terdapat 4 (empat) sektor, diantaranya adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan, serta sektor bangunan dan konstruksi. Keempat sektor tersebut merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian wilayah bagi kabupaten Bantul.

#### 4. Kabupaten Kulonprogo

Seperti halnya dengan kabupaten Bantul, kabupaten Kulonprogo juga memiliki 4 (empat) sektor unggulan. Sektor-sektor unggulan tersebut adalah sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan galian, sektor industri pengolahan serta sektor jasa-jasa lainnya.

#### 5. Kabupaten Gunung Kidul

Kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten yang memiliki sektor unggulan paling sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Kabupaten Gunung Kidul hanya memiliki 2 (dua) sektor unggulan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalan. Sedikitnya sektor unggulan yang dimiliki oleh kabupaten Gunung Kidul menyebabkan minimnya ekspor barang dan jasa yang dihasilkan sehingga kurang membantu perkembangan ekonomi wilayah dan menyebabkan kabupaten tersebut menjadi kabupaten yang relatif tertinggal jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan analisis LQ masing-masing kabupaten/kota dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan yang merupakan sektor sekunder serta sektor tersier lainnya (keuangan dan jasa) dapat diandalkan sebagai sektor perekonomian yang unggul dan mampu bersaing secara komparatif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, laju pertumbuhan sektor perekonomian tersebut selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan,

artinya sektor-sektor tersebut semakin berkembang dan dapat memberikan nilai tambah terhadap perekonomian wilayah.

## **B. Analisis Perkembangan Wilayah**

Mengetahui perkembangan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kegiatan ekonomi daerah serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan ekonomi daerah adalah analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui perkembangan dan karakteristik wilayah dari segi ekonomi. Hasil pengelompokan tersebut dapat menunjukkan terjadinya ketimpangan antar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut analisis Tipologi Klassen, daerah dibagi menjadi empat kuadran yaitu:

- 1) Kuadran I yaitu *daerah cepat maju dan cepat tumbuh*, merupakan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi.
- 2) Kuadran II yaitu *daerah maju tapi tertekan*, merupakan daerah yang memiliki pendapatn per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dari rata-rata provinsi.
- 3) Kuadran III yaitu *daerah berkembang cepat*, merupakan daerah dengan pertumbuhan tinggi, tetapi pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata provinsi
- 4) Kuadran IV yaitu *daerah tertinggal*, adalah daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dari rata-rata provinsi.

**Tabel 5.3 Rata-Rata PDRB Per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi di DIY Tahun 2008-2012**

NO	KAB/KOTA	RATA-RATA LPE (%)	RATA-RATA PDRB PER KAPITA (Juta Rupiah)
1	Yogyakarta	5,19	14.196.376
2	Sleman	4,95	5.886.993
3	Bantul	4,99	4.383.157
4	Kulonprogo	4,37	4.930.710
5	Gunung Kidul	4,34	4.626.181
<b>DIY</b>		<b>4,95</b>	<b>6.116.386</b>

Sumber: BPS DIY 2013

Keterangan: LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi

Hasil analisis Tipologi Klassen dengan menggunakan dua indikator utama yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita selama lima tahun terakhir diperoleh hasil untuk kategori wilayah cepat maju dan cepat tumbuh terdapat satu wilayah atau sekitar 20%. Untuk kuadran II yang merupakan wilayah maju tapi tertekan tidak terdapat satu kabupaten pun yang masuk dalam kategori ini karena tidak terdapat kabupaten yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dan pendapatan per kapita lebih tinggi dari tingkat provinsi. Pada kuadran ketiga, wilayah dengan kategori berkembang cepat terdapat dua wilayah atau sebesar 40% dan wilayah yang termasuk dalam kuadran keempat yaitu daerah relatif tertinggal terdapat dua wilayah atau sebesar 40%.

**Gambar 5.1 Klasifikasi Daerah Berdasarkan Tipologi Klassen**

<b>Y</b> <b>R</b>	<b><math>Y_i &gt; Y</math></b>	<b><math>Y_i &lt; Y</math></b>
<b><math>R_i &gt; R</math></b>	<b>Kuadran I</b> <b>Daerah Maju dan Cepat Tumbuh</b> Yogyakarta	<b>Kuadran III</b> <b>Daerah Berkembang Cepat</b> Sleman & Bantul
<b><math>R_i &lt; R</math></b>	<b>Kuadran II</b> <b>Daerah Maju Tetapi Tertekan</b> -	<b>Kuadran IV</b> <b>Daerah Relatif Tertinggal</b> Kulonprogo dan Gunung Kidul

*Sumber: Hasil Analisis Tipologi Klassen, Data Diolah*

Keterangan:

Y : Rata-Rata PDRB Per Kapita Provinsi

$Y_i$  : Rata-Rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota

R : Rata-Rata laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi

$R_i$  : Rata-Rata Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Hasil analisis Tipologi Klassen dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diklasifikasikan kedalam 3 kuadran yaitu:

- 1) Kuadran I yaitu daerah cepat maju dan cepat tumbuh.

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang berada pada klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,19% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar 14.196.376,00 menjadikan kota Yogyakarta termasuk dalam kriteria daerah cepat maju dan cepat tumbuh serta merupakan kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan dengan



tingkat provinsi yang rata-rata laju pertumbuhan ekonominya hanya 4,95% dan rata-rata PDRB per kapitanya sebesar 6.116.386,00. Kota Yogyakarta yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah ibu kota provinsi yang merupakan pusat perekonomian di DIY. Kota Yogyakarta memiliki aksesibilitas yang tinggi terhadap pusat pemerintahan dan memiliki sarana dan pra sarana serta fasilitas umum lainnya terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi yang lebih memadai dibandingkan kabupaten lainnya.

2) Kuadran III yaitu daerah berkembang cepat

Kabupaten yang termasuk dalam kriteria daerah berkembang cepat adalah kabupaten Sleman dan Bantul. Daerah berkembang cepat merupakan daerah dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun PDRB per kapita lebih rendah dari tingkat provinsi. Kabupaten Sleman memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95% dan PDRB per kapita sebesar 5.886.993,00 sedangkan kabupaten Bantul memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,99% dan rata-rata PDRB per kapita sebesar 4.383.157,00. Kabupaten Sleman dan Bantul memberikan andil yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY, kinerja ekonomi kabupaten Bantul yang semakin meningkat diharapkan mampu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah di DIY. Ciri-ciri yang menonjol dari daerah berkembang cepat adalah tersedianya sarana dan pra sarana serta fasilitas umum lainnya yang relatif lebih rendah di bandingkan dengan daerah pada kuadran I.

### 3) Kuadran IV yaitu daerah relatif tertinggal

Yang termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari tingkat provinsi adalah kabupaten Kulonprogo dan Gunung Kidul. Kabupaten Kulonprogo memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 4,37% dan PDRB per kapita sebesar 4.930.710,00. Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,34 dan PDRB per kapita sebesar 4.626.181,00. Ciri umum dari daerah relatif tertinggal adalah ketersediaan sarana dan pra sarana yang relatif kurang memadai dibandingkan kabupaten/kota lainnya yang lebih maju, mempunyai akses terhadap pemerintah pusat yang relatif lebih sulit serta hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat.

Analisis Tipologi Klassen menurut kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah di DIY masih menjadi kendala dalam pembangunan daerah. Kendala tersebut tidak dapat diatasi dengan mudah apabila belum ada kebijakan pemerataan pembangunan dari pemerintah daerah, seperti mengarahkan investasi ke kabupaten yang relatif tertinggal yaitu Kulonprogo dan Gunung Kidul.

### **C. Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah**

Ketimpangan pembangunan merupakan salah satu masalah yang sering muncul dalam proses pembangunan di suatu wilayah, namun masalah tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan. Adanya ketimpangan antar wilayah di

DIY dapat ditandai dengan adanya wilayah yang relatif tertinggal. DIY memiliki dua kabupaten yang diklasifikasikan dalam wilayah relatif tertinggal yaitu kabupaten Kulonprogo dan Gunung Kidul. Kedua kabupaten tersebut memiliki masalah dalam aspek pengembangan sumber daya manusia, aspek kelembagaan serta aspek sarana dan pra sarana daerah. Namun sebaliknya, DIY juga memiliki daerah yang maju dan memiliki kecenderungan aktivitas perekonomian yang berkembang cepat. Perbedaan kondisi geografis, sasaran kebijakan serta kondisi sarana dan pra sarana mengakibatkan perbedaan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah sehingga dapat memicu terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Untuk mengetahui sejauh mana ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta digunakan alat analisis Indeks Williamson dan Indeks Entropy Theil.

Indeks Williamson merupakan salah satu analisis yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan antar wilayah. Indeks Williamson digunakan untuk mendeskripsikan ketimpangan wilayah dengan menggunakan PDRB per kapita dan jumlah penduduk tiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Indeks Williamson akan menghasilkan indeks yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika nilai indeks yang dihasilkan lebih besar dari nol atau mendekati nilai satu menunjukkan terjadinya disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah, sedangkan jika nilai indeks sama dengan nol maka tidak ada disparitas antar wilayah yang terjadi.

Analisis Indeks Williamson dengan menggunakan data PDRB per kapita dan jumlah penduduk tiap kabupaten/kota di DIY dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 5.5.

**Tabel 5.4 Nilai Indeks Williamson DIY Tahun 2008-2012**

Tahun	Indeks Williamson
2008	0,435
2009	0,440
2010	0,447
2011	0,451
2012	0,454
Rata-Rata	0,445

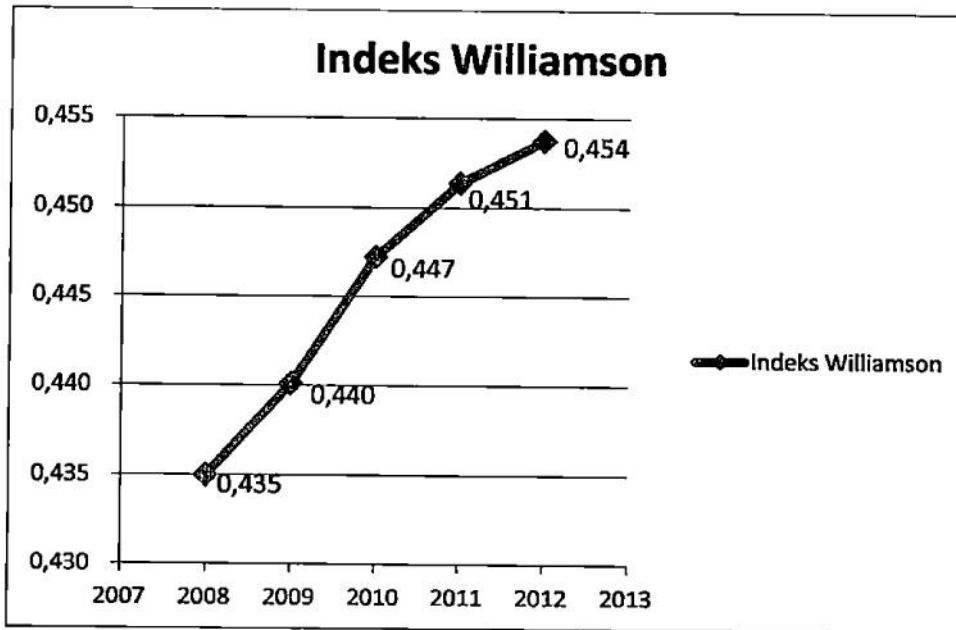
*Sumber: Hasil Analisis IW, Data Diolah*

Hasil pengukuran tingkat ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan analisis Indeks Williamson dapat diketahui bahwa selama 5 tahun terakhir, dengan nilai rata-rata sebesar 0,445 menunjukkan tingkat ketimpangan antar wilayah yang terjadi di DIY relatif tinggi. Selama periode penelitian angka indeks williamson terus mengalami kenaikan, artinya tingkat ketimpangan yang terjadi di DIY terus meningkat hal itu disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah urban yang datang ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya kota Yogyakarta sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya ketimpangan pendapatan.

Pada tahun 2008 angka Indeks Williamson hanya sebesar 0,435 dan menjadi 0,454 di tahun 2012. Pada tahun 2008 nilai indeks mencapai 0,435 naik sebesar 0,005% menjadi 0,440 di tahun 2009, kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 0,007% dan terus mengalami kenaikan sebesar 0,004 di tahun 2011 dan 0,003 di tahun 2012. Nilai Indeks Williamson yang berada di atas

0 (nol) menunjukkan adanya ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan besarnya nilai Indeks Williamson menunjukkan besarnya tingkat ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Gambar 5.2 Grafik Indeks Williamson DIY Tahun 2008-2013**



*Sumber: Hasil Analisis Indeks Williamson, Data Diolah*

Selain Indeks Williamson, alat analisis yang dapat digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan wilayah adalah Indeks Entropy Theil. Berdasarkan analisis Indeks Entropy Theil, nilai indeks menunjukkan hasil yang sama dengan indeks williamson bahwa ketimpangan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meningkat dari tahun ke tahun.

**Tabel 5.5 Nilai Indeks Entropy Theil DIY Tahun 2008-2012**

No	Kabupaten/Kota	Indeks Entropy Theil				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Yogyakarta	0,266	0,232	0,239	0,242	0,243
2	Sleman	-0,043	-0,044	-0,045	-0,046	-0,046
3	Bantul	-0,039	-0,040	-0,040	-0,040	-0,040
4	Kulonprogo	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
5	Gunung Kidul	-0,020	-0,019	-0,019	-0,019	-0,019
<b>DIY</b>		<b>0,135</b>	<b>0,140</b>	<b>0,146</b>	<b>0,148</b>	<b>0,149</b>

*Sumber: Hasil analisis Indeks Entropy Theil, data diolah*

Berdasarkan analisis Indeks Entropy Theil dapat disimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi di DIY tidak terlepas dari andil kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta merupakan penyumbang ketimpangan terbesar dibandingkan dengan empat kabupaten lainnya yaitu sebesar 0,266 di tahun 2008, 0,232 di tahun 2009, 0,239 di tahun 2010, 0,242 di tahun 2011 dan 0,243 di tahun 2012. Kota Yogyakarta merupakan wilayah yang memiliki perkembangan pembangunan lebih baik dari kabupaten lainnya, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya kontribusi PDRB kota Yogyakarta terhadap PDRB DIY. Berkembangnya aktivitas perekonomian koya Yogyakarta menyebabkan wilayah tersebut menjadi wilayah tujuan urban bagi masyarakat yang berharap akan mendapatkan penghasilan lebih besar dari pendapatan di daerah asalnya, hal tersebut merupakan salah satu penyebab tingginya tingkat ketimpangan di kota Yogyakarta. Begitupula halnya dengan ketersediaan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut. Kota Yogyakarta memiliki jumlah jenis fasilitas dan infrastruktur yang

lebih baik dengan kategori paling banyak jumlah jenisnya dibandingkan dengan seluruh kabupaten yang ada di DIY.

Karakteristik kota Yogyakarta yang merupakan daerah maju dan cepat tumbuh dengan ketersediaan sarana dan pra sarana yang lengkap menyebabkan wilayah tersebut menjadi pusat perekonomian dan memberikan dampak yang kurang baik bagi wilayah disekitarnya seperti kabupaten Kulonprogo dan Gunung Kidul. Kedua kabupaten tersebut memiliki sarana dan pra sarana yang sangat terbatas. Rendahnya aktivitas perekonomian, dan sumber daya manusia serta kondisi wilayah yang kurang subur menyebabkan kedua wilayah tersebut memiliki perkembangan paling kecil jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Pembahasan diatas telah menghasilkan identifikasi sektor-sektor unggulan, perkembangan ekonomi dan tingkat disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2012. Hasil analisis disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di DIY selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan meskipun nilai peningkatan tersebut masih relatif kecil, namun hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi di DIY semakin melebar. Hasil tersebut menunjukkan hasil yang sama dengan hasil analisis yang dilakukan oleh Restiatun dengan periode penelitian tahun 1993-2003 bahwa ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah di DIY yang dianalisis dengan Indeks Williamson dan Indeks Entropy Theil terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi disparitas pembangunan antar wilayah antara lain yaitu dengan melakukan penyebaran pembangunan prasarana perhubungan ke seluruh pelosok wilayah yang akhirnya akan berdampak pada lancarnya mobilitas perdagangan faktor produksi dan investasi, mendorong transmigrasi dan migrasi spontan, mengembangkan pendidikan antar wilayah, mengembangkan pusat pertumbuhan secara merata, serta melalui pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi pembangunan.